

Efektivitas Sanksi dalam Menanggulangi Pelanggaran Tata Tertib Siswa di MTs Negeri 2 Ketapang

Mustakar¹, Erwin², Usman³

^{1,2,3}Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia

¹mustakarkeanu@gmail.com

Abstrak

Pendidikan seharusnya memperhatikan prinsip hukuman sebagai upaya agar siswa tidak lagi melakukan kesalahan. Dalam konteks penerapan tata tertib sekolah, sanksi atau hukuman memiliki peranan penting mencegah pengulangan pelanggaran peraturan aturan. Hal ini pada akhirnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kepribadian siswa, yang diharapkan menjadi lebih bermoral dan disiplin. Tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif ini untuk menggali fenomena secara holistik dan kontekstual. Melalui pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan teori yang ada untuk memberikan penjelasan dan memperoleh pemahaman mendalam terhadap perilaku, prinsip, dan motivasi tindakan subjek penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada deskripsi yang menggambarkan fenomena bahasa, memperhatikan konteks alami, serta menggunakan berbagai metode ilmiah. Pemilihan pendekatan dan metode ini penting untuk memfokuskan sesuai tujuan yang diinginkan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pelanggaran Tata Tertib Sekolah*

Pendahuluan

Pengaruh pendidikan terhadap perkembangan beragam aspek kepribadian manusia sangatlah besar. Secara esensial, tujuan utama pendidikan adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi kemanusiaan individu, menjadikannya lebih baik dan lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya manusia (Wulandari et al, 2021). Dalam semua tahapan kehidupan, peran pendidikan menjadi krusial dalam membentuk cara berpikir, bertindak, dan berperilaku seseorang. Proses pendidikan sendiri disusun untuk mengungkap dan mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki manusia (Ali & Muhammadong, 2022).

Fokus pada tujuan pendidikan menjadi inti dari seluruh prosesnya, menjadi panduan dalam menjalankan berbagai kegiatan pendidikan. Menetapkan tujuan yang jelas dan tepat dalam pendidikan menjadi kunci untuk memastikan prosesnya berjalan dengan efisiensi dan efektivitas yang optimal. Pasal 3, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 No. 20, tujuan pendidikan nasional adalah untuk memperkaya potensi, membentuk karakter, serta membangun peradaban yang luhur bagi bangsa. Sasarannya adalah menciptakan individu yang memiliki keyakinan, budi pekerti, kesehatan, pengetahuan, kreativitas, kemandirian, serta memiliki kesadaran demokratis dan tanggung jawab.

Sekolah dianggap merupakan lembaga formal dalam membentuk kepribadian anak didik. Pandangan ini menggambarkan sekolah sebagai tempat di mana anak-anak berupaya membangun, mengembangkan, dan menajamkan potensi mereka serta mempersiapkan masa depan. Peran sekolah di sini adalah menyiapkan generasi muda untuk menjadi individu yang dewasa dan memiliki kebudayaan. Oleh karena itu, sekolah bertanggung jawab dalam membina, mengembangkan, dan meningkatkan potensi anak didik menuju kedewasaan dengan melalui program pembelajaran yang terarah dan tujuan yang jelas.

Program pembelajaran di sekolah telah disusun dengan teliti sesuai dengan tujuan kurikuler yang telah ditetapkan. Melalui pendekatan pengajaran ini, beragam potensi siswa seperti integritas, etika, ketaatan, dan tanggung jawab dapat dibentuk dan ditingkatkan di lingkungan sekolah. Implementasi peraturan atau tata tertib bagi generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Sebagai institusi pendidikan resmi, sekolah berfungsi sebagai platform untuk mengajarkan moral dan norma kepada siswa melalui peraturan-peraturan yang mengatur perilaku mereka.

Tata tertib di sekolah mencakup aturan-aturan yang mengawasi perilaku siswa pada saat berada di lingkungan sekolah, bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Depdikbud (1998) mendefinisikan tata tertib sebagai "aturan untuk perilaku siswa saat berada di sekolah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang positif." Peran utama dari tata tertib sekolah adalah memberikan panduan bagi perilaku siswa selama proses belajar-mengajar. Dalam konteks lingkungan sekolah, tata tertib sangat penting untuk menciptakan suasana yang teratur, damai, mendukung, dan diwarnai dengan kedisiplinan.

Kedisiplinan menjadi isu penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan keluarga, masyarakat, dan terutama di sekolah. Kedisiplinan di sekolah sangat berkaitan dengan implementasi aturan yang telah ditetapkan untuk membentuk disiplin siswa. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara siswa dan pendidik, dengan peran penting pendidik dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Kedisiplinan memainkan peran kunci dalam keberhasilan seorang guru dalam memberikan pembelajaran, mengajarkan siswa tentang tanggung jawab atas perilaku mereka, serta menghargai penggunaan waktu dengan efektif. Dengan demikian, keberhasilan dalam proses belajar-mengajar dapat tercapai secara optimal. Namun, isu yang terjadi dimasyarakat sebagian besar menilai hukuman atau pemberian sanksi atas pelanggaran kedisiplinan terlalu berlebihan, sehingga tidak sedikit sekolah disalahkan oleh para orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan ini.

Pemberlakuan tata tertib di antara siswa, utamanya untuk pelanggaran, menjadi fokus utama dalam upaya pembinaan di sekolah. Guru semestinya konsisten dalam menerapkan aturan sebagai pembimbing siswa, dan perlu adanya dukungan dari bentuk penegakan disiplin berupa hukuman, sebagai langkah terakhir jika pendekatan lainnya tidak berhasil. Pandangan yang berbeda terhadap hukuman dari masyarakat tentu dipertimbangkan sebagai masukan, tetapi meniadakan hukuman akan sulit menegakkan disiplin di sekolah. Hukuman ini bertujuan untuk mengubah perilaku negatif menjadi positif setelah siswa menyadari kesalahan yang dilakukannya, sebagaimana dijelaskan oleh Gordon (2020) bahwa hukuman bisa mencegah timbulnya perilaku anak yang tak dapat diterima atau membuat kacau.

Namun, penting untuk memperhatikan bahwa hukuman yang diberikan harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan siswa. Hukuman dalam konteks pendidikan harus menghindari kekerasan fisik atau tindakan yang terlalu keras karena hal tersebut bisa memunculkan agresi dan kekerasan pada anak. Hal ini dapat menyebabkan frustrasi dan dendam pada siswa, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas hukuman sebagai alat untuk mendisiplinkan.

Pembentukan disiplin pada siswa sebaiknya dimulai dari contoh yang ditunjukkan oleh guru dalam tindakan dan perilakunya sehari-hari. Melalui kesadaran akan pentingnya patuh terhadap tata tertib sekolah, diharapkan nilai ini dapat tertanam dalam moral dan perilaku siswa (Setyaningrum et al, 2020). Dengan demikian, diharapkan siswa dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, terutama dalam menjaga disiplin. Pendidikan Agama Islam juga berperan penting dalam membentuk nilai dan perilaku, dengan tujuan menerapkan disiplin dan tata tertib di lingkungan sekolah untuk memperlancar proses belajar (Yusri et al, 2023). Penggunaan tata tertib sekolah dengan penerapan hukuman atau sanksi diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin siswa.

Dilakukannya hukuman dan sanksi bertujuan mencegah siswa dari pelanggaran aturan, mendorong mereka untuk menghindari perilaku yang melanggar, serta berkontribusi pada pembentukan kepribadian yang bertanggung jawab dan teratur. Di MTs Negeri 2 Ketapang dan sekolah-sekolah lainnya di wilayah Kalimantan Barat, telah diupayakan penyusunan aturan tata tertib bagi siswa. Namun, meski langkah-langkah ini telah dijalankan, masih ada variasi dalam pola pelanggaran yang dilakukan siswa, seperti seringnya bolos, mengabaikan atribut sekolah, atau keluar kelas saat pelajaran berlangsung. Pandangan masyarakat yang masih menganggap hukuman sebagai sebuah Tindakan semena oleh sekolah menyebabkan hukuman di MTs Negeri 2 Ketapang menjadi kurang konsisten.

Berdasarkan paparan diatas, tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan yang ditetapkan bisa berbeda-beda. Karena hal tersebut, tak heran jika ada siswa kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan peraturan sekolah, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan pelanggaran aturan. Jenis pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh siswa MTs Negeri 2 Ketapang di lingkungan sekolah sangat bermacam-macam, mulai dari ketidakhadiran, membolos, hingga keluar kelas saat jam pelajaran, penolakan menggunakan seragam sekolah, absen dalam upacara bendera, dan berbagai pelanggaran lainnya. Pemberian hukuman yang seimbang perlu dilakukan oleh sekolah terhadap siswa pelanggar aturan ini. Sejauh ini, bagaimana efektivitas hukuman sebagai sanksi bagi siswa dalam melanggar tata tertib di MTs Negeri 2 Ketapang dilakukan?

Metode

Dalam upaya penelitian ini, peneliti telah memilih pendekatan kualitatif sebagai landasan metodologinya. Pemilihan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam. Penekanan pada pemilihan pendekatan dan metode penelitian sangatlah krusial untuk memastikan kesesuaian penelitian berdasarkan tujuan. Penelitian ini berdasarkan pada pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan menjelaskan secara sistematis kondisi dari objek atau bidang kajian pada suatu titik waktu dengan tepat. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menguraikan eksistensi suatu fenomena yang ada.

Data dikumpulkan dari lokasi penelitian dari responden di MTs Negeri 2 Ketapang yang berlokasi di jalan Rahadi Usman KM.20, Desa Sungai Besar, Kecamatan MHS (Matan Hilir Selatan), Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari sekolah. Ketidaksiplinan siswa menyebabkan sejumlah siswa sering melanggar aturan dan mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai konsekuensinya.

Peran langsung peneliti itu sendiri merupakan bagian dari instrumen. Peneliti menjadi figur utama yang aktif dalam melakukan penelitian, menetapkan fokus, memilih informan sebagai sumber data, dan melakukan interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan dari temuan yang ditemukan di lapangan. bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri menjadi instrumen, dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti buku catatan, wawancara dan kamera. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Tanpa pemahaman akan teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar kualitas data itu sendiri. Teknik pengumpulan data ini merupakan informasi yang mampu memberikan gambaran tentang situasi atau permasalahan tertentu, umumnya terkait dengan waktu dan tempat tertentu, dan dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil

Sanksi yang diterapkan kepada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan sekolah

Hasil dari wawancara maupun dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa beragam informasi mengenai pelanggaran siswa dapat dikumpulkan melalui proses tanya jawab dengan informan dan guru sebagai subjek penelitian. Pihak sekolah memberlakukan sanksi sebagai respons terhadap siswa sebagai pelanggar tata tertib. Misalnya, dalam percakapan dengan peneliti, Guru BP/BK Ibu Aida, S.Pd., menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil seperti pemberian teguran lisan dalam tiga tingkatan, penugasan tambahan, peringatan tertulis yang bervariasi, sanksi skorsing, hingga kemungkinan pemecatan dari lingkungan sekolah.

Sistem hukuman merupakan salah satu instrumen penting yang diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib sekolah. Dalam konteks ini, wawancara dengan ibu Aida, S.Pd., seorang guru BP/BK dan Pkn, mengungkapkan bahwa ada serangkaian sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar aturan sekolah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pertama-tama, bagi siswa yang melanggar aturan, sanksi yang diberikan adalah teguran lisan, yang dapat berlanjut dari pertama hingga ketiga kali. Selanjutnya, sanksi yang diterapkan adalah pelaksanaan tugas tambahan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Terdapat juga peringatan tertulis yang diberikan dalam beberapa tingkatan, mulai dari peringatan pertama hingga yang ketiga. Di samping itu, penerapan skorsing juga menjadi salah satu langkah dalam sistem hukuman sekolah. Puncaknya, sanksi terberat yang dapat diberikan adalah mengeluarkan siswa dari lingkungan sekolah.

Semua sanksi ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa terkait konsekuensi dari pelanggaran aturan, sekaligus menegakkan disiplin di lingkungan pendidikan. Pemberian hukuman bukanlah tujuan akhir, namun merupakan bagian dari upaya untuk membimbing siswa agar dapat lebih mematuhi peraturan serta menghormati tata tertib yang ada dalam lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Tu'u (2004) yang menyatakan bahwa disiplin muncul karena kesadaran diri. Sebaliknya siswa yang kerap kali melanggar ketentuan sekolah pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan prestasinya.

Sanksi yang diberikan dengan beragam pertimbangan ini pada dasarnya memberikan pelajaran bagi para siswa pelanggar peraturan di MTs Negeri 2 Ketapang. Sekolah berani memberikan sanksi dari yang ringan hingga berat didasari pada penegakkan disiplin di sekolah yang berlandaskan pada Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang budaya dan lingkungan sekolah/madrasah butir d yang berbunyi "tata tertib sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan masukan komite sekolah/madrasah dan peserta didik". Dan juga tidak melanggar UU No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

Pemberian pelajaran ini penting bagi siswa pelanggar peraturan, berdasarkan pada paradigma yang beranggapan bahwa sanksi bukanlah sebuah siksaan, tetapi sebuah upaya memberikan pembelajaran bagi siswa. Hal ini sejalan dengan Fiana et al (2013) yang menyatakan bahwa pandangan yang bisa menghambat jalannya disiplin adalah menganggap disiplin sebagai siksaan, merasa tidak ada yang mengawasi, menuruti hawa nafsunya, sikap egois dan mencari enaknya sendiri, contoh yang tidak baik, kesempatan melakukan perbuatan menyimpang, tidak merasa berdosa.

Penelitian Fiana et al (2013) menggarisbawahi bahwa pandangan atau sikap tertentu dari siswa dapat menghambat pembentukan kedisiplinan. Salah satunya adalah jika siswa melihat disiplin sebagai bentuk siksaan atau batasan yang membatasi kebebasan mereka. Ketika siswa merasa tidak diawasi secara ketat atau merasa tidak ada konsekuensi atas tindakan mereka,

mereka cenderung untuk lebih menuruti keinginan pribadi dan bersikap egois, mencari kenyamanan sendiri tanpa mempertimbangkan norma dan aturan yang berlaku. Pandangan ini dapat membuka peluang bagi siswa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan sekolah tanpa merasa memiliki rasa bersalah.

Namun, penting untuk dipahami bahwa pandangan-pandangan tersebut dapat diminimalisir dengan pendekatan yang tepat dalam mengkomunikasikan nilai-nilai disiplin. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk persepsi siswa terhadap kedisiplinan, yaitu dengan menjelaskan bahwa disiplin bukanlah bentuk siksaan, melainkan fondasi bagi pembentukan karakter yang kuat. Dengan menyediakan lingkungan yang mendukung, dialog terbuka, serta pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan manfaat dari kedisiplinan, siswa dapat melihatnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembentukan diri yang positif.

Selain itu, perlu adanya sosialisasi terus-menerus dan pembiasaan terhadap perilaku yang sesuai dengan aturan sekolah. Melalui contoh yang baik dari guru dan lingkungan sekolah yang mendukung, siswa akan memiliki referensi yang kuat tentang bagaimana menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengembangan pemahaman yang mendalam tentang arti sebenarnya dari kedisiplinan dapat membantu mengatasi pandangan negatif yang dapat menghambat jalannya proses pembentukan disiplin di kalangan siswa.

Sebagaimana temuan ini, bahwa sanksi dilakukan sesuai dengan pelanggaran dan melalui tahapan. Sesuai dengan hasil penelitian Madawarni (2015) Sanksi atas pelanggaran terhadap tata tertib sekolah perlu ditegakkan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran. Bahwa perlu mempertimbangkan antara ketidakdisiplinan yang kerap menghambat potensi siswa dan kesiapan siswa itu sendiri dalam menerima konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukannya.

Hambatan yang dihadapi oleh institusi pendidikan dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran terhadap tata tertib sekolah

Dalam penelitian ini, hukuman telah menjadi sarana utama yang diterapkan oleh pihak sekolah sebagai respons atas pelanggaran terhadap peraturan. Ditemukan bahwa beberapa pelanggaran yang sering terjadi di antara siswa adalah merokok, membawa HP, serta membawa sepeda motor ke area sekolah, yang pada sebagian kasus, sepeda motor tidak diparkir di lingkungan sekolah, tetapi di tempat lain di sekitar area sekolah.

Tata tertib yang telah ditetapkan oleh MTs Negeri 2 Ketapang seringkali tidak diikuti oleh sebagian siswa. Sebagai dampaknya, para guru pun tidak selalu mampu mengontrol seluruh siswa dalam menjalankan aturan tersebut. Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa meliputi merokok, membawa ponsel, bahkan membawa sepeda motor ke lingkungan sekolah. Hal ini teramati secara langsung oleh peneliti.

Lebih lanjut, siswa yang membawa sepeda motor seringkali tidak memarkirkannya di area sekolah, melainkan memilih untuk memarkir di rumah penduduk atau di warung-warung yang berdekatan dengan sekolah. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa sebagian siswa tidak hanya melanggar aturan dengan membawa kendaraan bermotor ke sekolah, tetapi juga tidak mematuhi peraturan terkait tempat parkir yang telah ditetapkan oleh madrasah.

Hukuman merupakan tindakan atas hambatan yang terjadi, yaitu ketika teguran tidak dapat membuat siswa jera atas pelanggaran yang dilakukan di MTs Negeri 2 Ketapang. Hasil wawancara dengan ibu Aida, S.Pd., seorang guru BP/BK dan Pkn, mengungkapkan bahwa bagi siswa yang sudah lebih dari tiga kali berturut-turut melanggar peraturan yang sama, dan sudah ditegur secara lisan maupun tulisan dikenakan hukuman.

Ketika siswa melanggar aturan secara berulang setelah mendapat teguran, langkah hukuman diambil sebagai upaya untuk menegakkan kedisiplinan dan memberikan konsekuensi yang tepat. Tindakan MTs Negeri 2 Ketapang memberikan hukuman adalah tindakan terakhir.

Hukuman merupakan tindakan terakhir yang diberikan kepada anak karena telah melakukan pelanggaran. Artinya, hukuman dilakukan jika telah diberikan peringatan dan teguran yang baik tapi tidak berubah ke arah yang lebih baik, maka cara terakhir ialah diberikan hukuman.

Hukuman di sini bukan hanya sebagai bentuk penindakan, tetapi juga bertujuan untuk menjadi pembelajaran agar siswa dapat memahami kesalahan yang telah mereka lakukan. Melalui penerapan sanksi hukuman, diharapkan pesan moral yang esensial dapat ditanamkan dalam diri anak atau peserta didik. Hal ini mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, serta kesadaran untuk bertindak dengan lebih berhati-hati. Pemberian hukuman tidak hanya sebagai upaya menegakkan aturan yang telah disepakati, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran agar anak memahami konsekuensi dari perbuatan yang melanggar aturan. Dengan demikian, diharapkan anak dapat lebih menghargai aturan yang ada dan bertindak dengan kesadaran penuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sekolah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2017) di sebuah SMA di Surabaya, hasil menunjukkan bahwa penerapan hukuman memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk disiplin siswa. Sebanyak 81,64% peserta didik menyatakan setuju dengan adanya sanksi atas pelanggaran kedisiplinan. Mereka melihat bahwa hukuman yang diberlakukan membawa perubahan positif, seperti terlihat dari berkurangnya jumlah siswa yang terlambat masuk sekolah.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ardi (2012) yang menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara pemberian hukuman di lingkungan sekolah dengan tingkat kedisiplinan siswa dalam proses belajar mereka. Namun, lebih dari sekadar hukuman sebagai instrumen tunggal, perlu dipertimbangkan juga bagaimana pendekatan secara holistik dalam membentuk perilaku dan disiplin siswa.

Penerapan pendekatan yang berbasis pada pengembangan karakter, pembinaan, dan pemahaman atas nilai-nilai yang lebih mendalam, bersamaan dengan pemberian sanksi, dapat menjadi landasan yang lebih kokoh untuk menciptakan lingkungan belajar yang disiplin. Hal ini dapat mencakup program pembinaan kesadaran akan pentingnya kedisiplinan, dialog terbuka antara guru dan siswa, serta penerapan sistem reward yang memberikan pengakuan atas kepatuhan siswa terhadap aturan.

Oleh karena itu, pentingnya peran hukuman dalam membentuk kedisiplinan siswa tidak bisa dipungkiri, namun integrasi dengan pendekatan-pendekatan lain yang lebih mendalam dan komprehensif akan membawa dampak yang lebih positif dalam membentuk karakter dan disiplin siswa secara keseluruhan.

Menurut Kartono (1992), hukuman harus memuat nilai-nilai pendidikan yang membantu siswa bertanggung jawab secara sosial, mendorong perilaku yang baik, dan menghindari tindakan yang melanggar aturan. Adapun jenis hukuman dapat dilakukan dengan berbagai bentuk kebijakan madrasah yang tidak melanggar hukum negara. Menurut Suharjo & Pribadi (2022) setiap alat-alat pendidikan, selalu memiliki dampak dan manfaat tersendiri. Hal tersebut juga berlaku dalam salah satu alat pendidikan yakni hukuman, yang mana hukuman ini dampaknya lebih daripada dampak dari ganjaran atau reward.

Menurut William Stern, sebagaimana disitir dalam Purwanto (2014), terdapat tiga jenis hukuman yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak yang menerimanya. Pertama adalah hukuman asosiatif, di mana seorang anak cenderung menghindari perilaku yang tidak diinginkan untuk menghindari hukuman yang akan diterimanya. Jenis kedua adalah hukuman logis, yang umumnya diterapkan pada anak-anak yang memiliki pemahaman yang lebih matang tentang hubungan sebab-akibat. Mereka menyadari bahwa hukuman yang diterima merupakan konsekuensi logis dari perilaku buruk yang mereka lakukan.

Sementara itu, jenis ketiga adalah hukuman normatif, yang bertujuan untuk memperbaiki nilai moral anak-anak atau peserta didik yang telah melanggar norma etika, seperti berbohong atau mencuri. Hukuman ini lebih berfokus pada pemulihan nilai-nilai etika dan moralitas yang seharusnya menjadi dasar bagi perilaku anak-anak dalam interaksi sosial. Konsep ini mempertimbangkan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan orientasi moral yang kuat pada anak-anak dalam lingkungan pendidikan.

Memberikan hukuman, penting untuk memberikan penjelasan yang tepat dan pemahaman yang mendalam kepada siswa. Proses ini membantu siswa untuk tidak hanya melihat hukuman sebagai sanksi, tetapi juga sebagai pengalaman belajar dari kesalahan mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam memberlakukan sanksi terhadap siswa yang melanggar aturan adalah ketidakseimbangan antara jumlah siswa yang banyak dengan jumlah staf pengawas yang terbatas. Kondisi ini mengakibatkan kendala dalam mengawasi secara menyeluruh siswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan sekolah. Sekolah telah berupaya mengatasi permasalahan ini dengan langkah-langkah seperti melakukan sosialisasi secara teratur mengenai peraturan sekolah serta memberikan teguran kepada siswa yang melanggar aturan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap aturan sekolah meskipun dalam kondisi keterbatasan pengawasan yang ada.

Selain upaya sosialisasi dan pemberian teguran, sekolah terus mencari solusi lain untuk mengatasi tantangan pengawasan terhadap siswa yang melanggar aturan. Beberapa usaha yang telah dijalankan mencakup pemikiran untuk meningkatkan jumlah staf pengawas siswa, baik dengan merekrut lebih banyak personel atau melibatkan tenaga sukarelawan dalam pengawasan sekolah.

Selain itu, pihak sekolah juga mempertimbangkan penerapan teknologi atau sistem pengawasan yang lebih canggih untuk mendukung tugas pengawasan walau masih dalam keterbatasan. Hal ini dapat termasuk pemasangan kamera pengawas di sebagian tempat atau sistem pelaporan digital yang memudahkan identifikasi pelanggaran serta memonitor aktivitas siswa secara lebih efektif.

Dengan mempertimbangkan berbagai solusi tersebut, sekolah berupaya keras untuk menciptakan lingkungan yang lebih terawat dan teratur serta meningkatkan disiplin siswa dan berupaya menghilangkan segala hambatan dalam penegakan disiplin di madrasah. Tujuannya bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga membentuk karakter siswa agar lebih bertanggung jawab dan menghormati norma yang berlaku di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, pengembangan strategi pengawasan yang lebih efektif diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.

Pembahasan

Penerapan sanksi di lingkungan sekolah terhadap pelanggaran tata tertib merupakan bagian integral dalam upaya mencapai efektivitas (Hendri et al, 2016). Secara etimologis, konsep efektivitas memiliki asal-usul dari kata bahasa Inggris "effective," yang menggambarkan kemampuan untuk mencapai suatu hasil, kemudian berkembang menjadi "efektivitas." Dalam pengertian terminologi, efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian suatu tujuan. Suatu tindakan dianggap efektif jika mampu mencapai tujuannya.

Sekolah, sebagai wadah pendidikan, menjadi lingkungan dimana siswa berusaha membangun, mengembangkan, dan memperbaiki seluruh potensi mereka menuju kedewasaan. Konsep ini sejalan dengan pendapat Zidane et al (2017) yang mengartikan efektivitas adalah

ukuran target (baik dari segi waktu, kualitas, kuantitas) tercapai. Semakin tinggi presentase pencapaian target, semakin besar efektivitasnya.

Efektivitas pendidikan adalah apakah seperangkat sumber daya tertentu memiliki efek positif pada pencapaian dan, jika ya, seberapa besar efeknya (Lockheed et al, 1994). Menurutnya efektivitas tidak secara langsung membandingkan penggunaan sumber daya atau biaya, maka yang efektif belum tentu yang paling efisien.

Pemberian hukuman secara bertingkat dari tahap ringan hingga tahap berat merupakan cara efektif dalam memberlakukan sanksi di MTs Negeri 2 Ketapang. Dari mulai teguran lisan hingga tiga kali, kemudian sanksi berupa tugas tambahan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan peringatan tertulis sebanyak hingga tiga kali. Jika masih belum efektif diterapkan system skorsing, jika masih belum efektif maka diterapkan hukuman mendropout siswa dari sekolah. Jika masing-masing tahapan belum efektif maka dilanjutkan tahapan sanksi selanjutnya, dan seterusnya. Penerapan system berjenjang ini memberikan peluang bagi siswa untuk memperbaiki diri, hal lainnya memberikan kesempatan bagi orang tua atau masyarakat untuk memberikan masukan atas penegakan disiplin yang dilakukan MTs Negeri 2 Ketapang. Dengan cara yang konsisten, pada akhirnya masyarakat akan menerima penegakkan disiplin oleh sekolah.

Hubungan antara "efektif" (effective) dan "efisien" (efficient) memiliki relevansi penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pandangan Chester I. Barnard menyatakan bahwa pada dasarnya, pemahaman umum tentang efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian hasil, yang sering kali dikaitkan dengan efisiensi, walaupun pada kenyataannya ada perbedaan antara keduanya. (Prawirosentono, 1999). Pandangan ini menggambarkan bahwa efektivitas merupakan ukuran pencapaian target (baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun waktu). Semakin besar persentase pencapaian target, semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Secara umum, efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian hasil, meski sering kali dikaitkan dengan konsep efisiensi, walaupun keduanya memiliki perbedaan. Efektivitas menitikberatkan pada hasil yang tercapai, efisiensi lebih menitikberatkan pada mencapainya dengan membandingkan output dan input.

Efisiensi mengacu pada perbandingan antara input dan output terkait. Sistem yang lebih efisien memperoleh lebih banyak output untuk serangkaian input sumber daya yang diberikan, atau mencapai tingkat output yang sebanding dengan input yang lebih sedikit, dengan hal-hal lain dianggap sama (Lockheed et al, 1994).

Perbedaan antara efektivitas dan efisiensi terletak pada perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi lebih menekankan pada rasio antara input dan output, sementara efektivitas lebih terkait dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. Menurut Georgopoulos dan Tannebaum "Efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi sebagai sistem sosial, dengan segala sumber daya dan sarana yang dimilikinya, dapat mencapai tujuannya tanpa memberikan tekanan berlebih pada anggotanya." (Tangkilisan, 2004). Konsep ini menggambarkan bahwa efektivitas mengukur suatu pemberian sanksi pada sekolah, sebagai sistem sosial, mampu memenuhi sejauhmana tujuan-tujuannya secara optimal semua sumber daya dan alat yang tersedia.

Kesimpulan

Jenis hukuman diberlakukan terhadap siswa pelanggar aturan di MTs Negeri 2 Ketapang terbagi menjadi sanksi fisik dan administratif. Sanksi fisik mencakup kegiatan seperti berlari mengelilingi lapangan, membersihkan lingkungan sekolah, dan sebagainya. Sementara itu, sanksi administratif mencakup berbagai tindakan seperti peringatan, teguran, pemberian

nasihat, pemanggilan orang tua, pemberian sanksi skorsing, hingga pengembalian siswa kepada orang tua dengan keputusan untuk dikeluarkan dari sekolah.

Salah satu hambatan sekolah pada kegiatan memberlakukan sanksi kepada siswa pelanggar aturan adalah ketidakseimbangan antara jumlah siswa yang banyak dengan jumlah staf pengawas yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan bagian pengawasan terhadap siswa yang melanggar aturan menjadi terbatas. Pihak sekolah telah melakukan upaya-upaya mengatasi permasalahan, seperti memberikan sosialisasi secara rutin serta teguran. Teguran diberikan langsung ketika siswa melanggar pada saat kejadian.

Acknowledgment

Terima kasih kepada para Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia, yang telah memberikan banyak masukan atas penelitian ini. Juga kepada Guru MTs Negeri 2 Ketapang yang telah bersedia untuk bekerjasama dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

References

- Ali, Lukman & Muhammadong. (2022). Manusia: Kebutuhan dan Kemungkinan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(10), 1-10.
- Ardi, M. (2012). Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar (Penelitian Eksperimen di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang). *EKSOS*, 1(1), 61-72.
- Ayu, Intan Kusuma. (2017). Respon Siswa Terhadap Pemberian Hukuman Pada Siswa Yang Melanggar Disiplin di SMA Kartika IV-3 Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1(1), 272-285.
- Depdikbud. (1998). *Wawasan Wiyata Mandala*. Jakarta: Depdikbud.
- Fiana, Fani & Daharnis, Daharnis & Ridha, Mursyid. (2013). Disiplin Siswa di Sekolah dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Konselor*, 2(3), 23-33.
- Gordon, Thomas. (2020). *Menjadi Orang Tua Efektif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hendri, Yulfi & Daharnis, Daharnis & Nurfahanah, Nurfahanah. (2016). Pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan oleh Siswa Di sekolah dan Implikasinya terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Konselor*, 3(2), 46-51.
- Kartono, Kartini. (1992). *Psikologi Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Lockheed, Marlaine & Hanushek, Eric & Policy, HRO. (1994). Concepts of educational efficiency and effectiveness. DOI: [http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/\[in=epidoc1.in\]?t2000=006905/\(100\)](http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]?t2000=006905/(100)).
- Mardawani. (2015). Ketaatan Siswa Dalam Mematuhi Tata Tertib Sekolah (Studi Kasus Pada Siswa SMA Nusantara Indah Sintang). *Vox Edukasi*, 6(1), 36-49.
- Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang budaya dan lingkungan sekolah/madrasah.
- Prawirosentono, Suyadi. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan-Kiat membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE.
- Purwanto, M. N. (2014). *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setyaningrum, Yayuk & Rais, Rahmat & Setianingsih, Eka. (2020). Peran Guru Kelas dalam Pembentukan Karakter Disiplin pada Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru*, 3(3), 542-548.
- Suharjo, Susmita & Pribadi, Farid. (2022). Berbagai Dampak Hukuman (Punishment) dalam Pendidikan Terhadap Peserta Didik. *Jurnal Inovatif Ilmu Pendidikan*, 3(2), 161-174.

- Tangkilisan, Nogi Hessel. (2004). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tu'u, Tulus. (2004). *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. Jakarta. Grasindo.
- UU No 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.
- Wulandari, Aprilina & Fauzi, Agus. (2021). Urgensi Pendidikan Moral dan Karakter Dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*, 6(1), 75-85.
- Yusri, Nadia & Ananta, Muhammad & Handayani, Widya & Haura, Nurul. (2023). Peran Penting Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Pribadi yang Islami. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-12.
- Zidane, Youcef J-T & Olsson, Nils. (2017). Defining project efficiency, effectiveness and efficacy. *International Journal of Managing Projects in Business*, 10(3), 621-641.